



Membangun Iklim Dunia Usaha Riau Kondusif & Kompetitif

LAPORAN TAHUNAN 2018



**MENITI PERUBAHAN
MENJEMPUT PELUANG
MEMBANGUN HARAPAN**

**DEWAN PIMPINAN PROVINSI RIAU
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA**
THE EMPLOYERS' ASSOCIATION OF INDONESIA





VISI

**TERCIPTANYA IKLIM USAHA YANG
KONDUSIF DAN KOMPETITIF**

MISI

- 1. MENGEMBANGKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN PRODUKTIF**
- 2. MELINDUNGI, MEMBELA DAN MEMBERDAYAKAN SELURUH PELAKU USAHA**
- 3. BERPERAN AKTIF DALAM MENINGKATKAN INVESTASI**
- 4. BERPERAN AKTIF DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMERINTAH**

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA DPP APINDO RIAU	
PESAN KETUA UMUM DPN APINDO MENYAMBUT 2019	
SUBSTANSI FOKUS OUTLOOK APINDO 2019	
PENDAHULUAN	1
PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN	5
1. AKTIFITAS INTERNAL	6
A. Konsolidasi DPK	6
B. Pertemuan dengan Members/ Stakeholders	7
C. Menyikapi Regulasi	8
D. Menghadiri Acara DPK	9
E. Fasilitator Perundingan.....	10
F. Penerbitan Dokumen	11
2. AKTIFITAS PROGRAM KEMITRAAN.....	11
3. AKTIFITAS PARTISIPAN KEGIATAN	12
A. Kegiatan Tingkat Lokal Daerah	12
B. Kegiatan Tingkat Nasional	22
C. Kegiatan Tingkat Regional	23
4. SEBAGAI NARASUMBER	23
5. SEBAGAI ANGGOTA TIM	23
A. Dewan Pengupahan	23
B. LKS Tripartit	23
C. Pengurus BKSP Riau	24
D. Panitia LIPESIA 2018	24
E. Tim Juri Penhargaan Siddhakarya 2018	24
F. Tim Juri Penghargaan Paritrana 2018	24
G. Tim Penyusunan KLHS RPJMD Prov. Riau 2019 – 2024	25
H. Pengurus FKJP Riau	25
KEANGGOTAAN	26
TUGAS POKOK SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN	27
1. DASAR H UKUM DEWAN PENGUPAHAN	27
2. CAPAIAN KINERJA DEWAN PENGUPAHAN RIAU	28
3. PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTOR MIGAS	28

PERKEMBANGAN DEWAN PIMPINAN KABUPATEN/ KOTA	30
1. KONDISI DPK SE RIAU	30
2. KINERJA DPK DALAM PENETAPAN UMK	30
3. KEANGGOTAAN PERUSAHAAN DI DPK	31
 APINDO TRAINING CENTER	 32
A. Kegiatan	32
B. Struktur Manajemen ATC	33
 POKOK-POKOK RENCANA KERJA 2019.....	 35
PENUTUP	36

SAMBUTAN KETUA DPP APINDO RIAU



Tahun 2018 sudah kita lalui bersama dengan segala fenomena yang terjadi di segala aspek berbangsa dan bernegara baik bidang sosial, ekonomi, politik, hankam, dan budaya. Banyak agenda yang telah memberikan kita catatan-catatan penting untuk dilanjutkan pada tahun 2019 atau *dicut-off* sebagai jejak yang hanya patut untuk dilupakan.

Sebuah tuntutan zaman yang harus kita hadapi bersama dalam apapun profesi kita adalah keberanian untuk berubah. Waktu terus berjalan, zaman mengalami perubahan. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa sesiapaupun yang mampu beradaptasi terhadap perubahan, maka dia akan bertahan. Dan siapapun yang mampu melihat peluang dalam suatu perubahan waktu maka dia akan jadi pemenang. Seleksi alam akan tetap berlaku, termasuk dalam dunia bisnis modern saat ini.

Namun demikian melakukan perubahan memang tidak mudah. Rob Urichuck, seorang motivator dan penulis mengatakan, *dibutuhkan keberanian untuk berubah, karena perubahan tidak selalu berhasil, disinilah kebanyakan orang menyerah.*

Pada saat ini dunia usaha baik jasa maupun manufaktur dihadapkan pada perubahan cepat khususnya dibidang teknologi digital. Era saat ini diperkenalkan dengan nama Revolusi Industri 4.0. Era yang dianggap memasuki revolusi industri ke-4 yang menuntut para pelaku usaha industri merubah cara pandang dan terminologi konsep bisnis ke arah digitalisasi cerdas. Prof. Paul Krugman (Ekonom US – Pemenang Nobel Bidang Ekonomi 2008) menyebut bahwa Revolusi Industri 4.0 sebagai *A New Industrial Revolution: the Rise of the Robot.*

Sejalan hal tersebut, kita merasakan bahwa revolusi ini sudah menjalari masyarakat kita hampir disemua lapisan. Aktivitas transaksional, belanja produk konsumtif, marketing, bahkan forum komunitas sosial sudah menggunakan media digital. Semua aktivitas bisa diakses melalui genggaman tangan dimanapun, kapanpun, dengan cepat.

Sengaja dalam sambutan ini kami membuka dengan paparan ringkas era 4.0 adalah untuk membuka *mind set* bahwa kita dihadapkan

pada pilihan untuk *moving toward* mengikuti era kekinian atau bertahan pada sistem lama yang tidak berapa lama akan digeser peradaban.

Selanjutnya terkait pada situasi politik daerah dan nasional, Riau telah menuntaskan pesta politik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018 – 2023. Kini secara nasional pada tahun 2019 kita dihadapkan pada kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai elemen mewakili dunia usaha, DPP APINDO Riau berharap dua agenda ini akan memberikan warna yang lebih cerah bagi pertumbuhan iklim usaha dan investasi. Siapapun yang diberikan amanah kepemimpinan kami berharap dapat memberikan kondusivitas bagi keberlanjutan dunia usaha yang ada serta meraih investasi baru khususnya di Bumi Riau tercinta ini. Menyitir bait lagu Lancang Kuning yang penuh makna "*Kalau nakhoda kuranglah paham, alamat lah kapal akan tenggelam*". Tersirat makna bahwa kekuatan leadership menjadi sangat besar pengaruhnya untuk membawa daerah dan negara ini maju atau tidaknya.

Kami DPP APINDO Riau sangat optimis menyambut tahun mendatang untuk semakin baiknya pertumbuhan dunia usaha dan ekonomi nasional. Satu kesyukuran juga bagi kami yang telah ikut mendorong, yaitu kembalinya Blok Rokan ke Riau. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan bagi Riau yang seyogyanya sejak lama telah memperjuangkan. Kembalinya Blok Rokan ke Riau akan membuka peluang besar untuk meningkatnya pendapatan daerah dan lapangan kerja baru bagi anak negeri ini.

Disisi lain secara terbuka kita juga harus jujur bahwa negeri ini juga punya masalah yang masih belum terselesaikan. Anjloknya harga CPO di pasaran dunia, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar US yang masih tinggi, harga minyak yang juga masih tinggi, suku bunga perbankan yang masih fluktuatif, regulasi yang tumpang tindih, dan lainnya. Hal ini tentunya menjadi tugas kita bersama, dimana pemerintah sebagai regulator merupakan *leading sector* dalam penyelesaian persoalan-persoalan tersebut. Kami berkeyakinan tahun 2019 akan menjadi lokomotif menuju perubahan yang lebih baik untuk Riau dan nasional.

Buku Annual Report 2018 ini kami mengusung thema *Meniti Perubahan Menjemput Peluang Membangun Harapan*. Adapun yang kami maksudkan dalam thema ini adalah bahwa pada saat ini suka atau tidak kita tengah berhadapan dengan gelombang perubahan-perubahan besar baik lokal, nasional, maupun dunia di berbagai bidang terutama regulasi dan teknologi, yang sesungguhnya perubahan itu memberikan kita peluang-peluang baru untuk direbut menuju dunia usaha yang lebih dinamis dan tangguh. Orang bijak berkata, perubahan bisa dilihat

sebagai tantangan dan peluang atau sebaliknya memandangnya sebagai sebuah tekanan.

Melalui buku ini kami ingin menyampaikan sejumlah aktifitas pada tahun 2018 yang telah kami laksanakan dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengurus DPP APINDO Riau.

Pada tahun 2019 ini, sejumlah pekerjaan rumah dan tantangan masih akan ada bagi DPP APINDO Riau. Kami akan terus berupaya merangkul lebih erat pelaku usaha Riau agar kami bisa memposisikan diri sebagai mitra yang berpihak dan bersinergi dalam memacu pertumbuhan dunia usaha.

Pada posisi sebagai wakil dunia usaha, APINDO tetap akan menjadi mitra pemerintah dalam mendukung laju pertumbuhan investasi dan iklim dunia usaha Riau. Namun demikian kami juga akan tetap pada sikap kritis untuk mengawal segala kebijakan yang ada agar produk hukum tersebut mempunyai keberpihakan kepada pelaku usaha yang merupakan aset ekonomi daerah dan nasional.

Satu kebahagiaan bagi kami mendengar statemen Kepala DPMPTSP Provinsi Riau Evarefita terkait APINDO Riau, melalui salah satu media lokal, yang menyatakan sebagai berikut: *"Sejauh ini Apindo dinilai mampu mengembangkan organisasinya dengan baik serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra dari BPMP2T Riau mendorong tumbuhnya investasi baru dan menciptakan investasi di Riau lebih kondusif"*.

Pernyataan ini menjadi kebanggan bagi kami dan sekaligus sebagai tantangan pada tahun 2019 untuk tetap berbuat yang terbaik bagi dunia usaha di Riau untuk mencapai visi *Membangun Iklim Dunia Usaha Riau Kondusif dan Kompetitif*.

*Kalau tuan hendak mencari udang
Jangan lupa bawa kail dan umpan
Walau tantangan kian berat menghadang
Dunia usaha harus tetap tampil terdepan*

Salam sukses, salam dunia usaha.

Pekanbaru, Januari 2019

DPP APINDO Riau

**WIJATMOKO RAH TRISNO
KETUA**



Pesan Ketua Umum DPN APINDO Menyambut 2019

Pada 31 Januari 2019 ini APINDO akan genap berusia 67 tahun, suatu perjalanan yang panjang bagi suatu organisasi dunia usaha dalam memberikan kontribusinya untuk negara kita tercinta dimana berbagai tantangan dan rintangantelah kita lalui bersama untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Pada awal mula berdirinya APINDO memang lebih banyak menangani masalah ketenagakerjaan khususnya dalam hal peningkatan kualitas tenaga kerja, produktivitas, daya saing dan penyerapan tenaga kerja. Dengan berjalannya waktu dan kebutuhan dunia usaha yang semakin dinamis dalam 10 tahun terakhir APINDO semakin meyakini bahwa masalah tidak dapat berdiri sendiri namun berkaitan erat dengan iklim investasi. Hanya dengan iklim investasi yang kondusif akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sejak tahun 2009 APINDO menangani bidang investasi secara serius dan konsisten. APINDO berpendapat bahwa kondisi ekonomi saat ini semakin membaik, terlihat dalam berbagai indikator makro ekonomi yang positif serta pengakuan lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF terhadap perbaikan peringkat kemudahan memulai usaha, peringkat daya saing. Lembaga pemeringkat investasi internasional seperti Moody's, Standard & Poor's dan Fitch juga menempatkan Indonesia pada posisi layak investasi (investment grade). Hal ini harus direspon sungguh-sungguh oleh pemerintah dan pelaku usaha agar momentum dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Setelah fenomena kelesuan sempat mewarnai gerak indikator konsumsi maupun barometer industri manufaktur di 2016 dan 2017, Pemerintah telah berupaya untuk membuktikan hasil kerja reformasi struktural, yang membuahkan hasil pada beberapa kuartal 2018 lalu dengan semakin bergerak pulihnya ekonomi nasional, serta membaiknya kinerja dunia usaha, terutama sektor industri manufaktur. Kejutan dan tantangan ekonomi dan sosial eksternal juga mewarnai dinamika 2018, terutama faktor perang dagang AS-RRT serta penguatan US Dollar terhadap sebagian besar mata uang global. Meredanya tekanan-tekanan eksternal tersebut pada akhir 2018 lalu patut disyukuri untuk dapat menjadi landasan penguatan optimisme yang semakin terbentuk dalam memasuki tahun 2019 ini, yang akan berjalan beriringan dengan pesta demokrasi kepemimpinan nasional untuk menghasilkan kepemimpinan nasional 2019-2024.

Setelah kita mampu melewati Pilkada 2017 dan 2018 yang relatif aman, sukses, dan lancar, kini kita akan menghadapi sekaligus mencermati perkembangan peta politik nasional dalam memasuki proses kontestasi kepemimpinan nasional 2019-2024. Pelaksanaan Pilkada 2017 dan 2018 yang tenang dan lancar dapat dijadikan contoh dan

pedoman yang tepat bagi pelaksanaan dan pengawalan Pilpres 2019 untuk menghasilkan suksesi kepemimpinan nasional 2019-2024 yang minim gejolak dan mampu menghadirkan suasana aman dan lancar. Oleh karena itu APINDO berharap Pemerintah dapat menyelenggarakan Pilpres 2019 dengan baik agar kepemimpinan nasional 2019-2024 yang dihasilkan nantinya dapat menuntun dan mengarahkan para Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 2017-2018 untuk berjalan seiring dan seirama dalam mengawal gerak ekonomi kondusif kita yang semakin pro investasi dan pro pengembangan iklim usaha sekaligus mampu menyediakan lapangan kerja berkualitas.

Dalam lingkup interaksi internasional, APINDO mengapresiasi upaya Pemerintah beserta tim negosiasinya dalam memperluas kerjasama perdagangan, sekaligus mengkritisi berbagai upaya tersebut agar lebih diarahkan kepada inovasi diversifikasi pasar seperti Asia Tengah dan Afrika. Perang Dagang yang tengah berlangsung antara China dengan Amerika Serikat tentu memiliki imbas terhadap kinerja neraca perdagangan Indonesia. Tercapainya kesepakatan perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) semestinya menjadi penyemangat bagi Pemerintah serta stakeholders terkait lainnya dalam mempercepat pencapaian kesepakatan perundingan kerjasama perdagangan dalam skema Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership (IEU CEPA).

Presiden Joko Widodo dalam pertemuan World Economic Forum di Vietnam pada September 2018 telah mengupayakan agar hambatan perdagangan produk-produk Indonesia ke Vietnam dapat dihilangkan, utamanya hambatan terhadap produk otomotif Indonesia. Hal ini semestinya menjadi pemicu bagi seluruh pihak yang terlibat dalam negosiasi kesepakatan perdagangan dengan berbagai kawasan, bahwa keberhasilan negosiasi yang dilakukan seorang kepala negara harus diikuti dengan keberhasilan negosiasi serupa oleh level di bawahnya. Keberhasilan negosiasi kesepakatan perjanjian perdagangan tersebut tentunya harus tetap memperhatikan masukan-masukan dunia usaha, khususnya APINDO, agar poin-poin perundingan tidak menjadi blunder yang dapat merugikan kinerja ekspor industri domestik di masa mendatang.

APINDO menyambut baik kesimpulan substantif IA-CEPA antara Indonesia dan Australia pada 31 Agustus 2018. Meskipun detail perjanjian itu sendiri belum diumumkan oleh perunding Indonesia dan Australia, APINDO terus terlibat dalam proses negosiasi melalui Kelompok Kerja Bisnis Indonesia-Australia (IABPG) dan rekomendasi bersama IABPG kepada IA-CEPA yang telah diterbitkan telah diperhitungkan dalam negosiasi. Apresiasi juga saya berikan terhadap hasil negosiasi IE-CEPA (Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement), yang setelah 7 tahun bernegosiasi, IE-CEPA secara substansial berakhir pada 26 November 2018 di Jenewa Swiss. APINDO menganggap kesimpulan IE CEPA sebagai langkah penting untuk menyimpulkan negosiasi perdagangan Indonesia di masa depan dengan negara-negara maju, khususnya IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement). Oleh karena itu saya mengucapkan selamat kepada Pemerintah atas terobosan yang telah dilakukan melalui kesimpulan IE-CEPA. APINDO menantikan sosialisasi publik dari transaksi perdagangan yang terperinci dan konsesi yang diberikan kepada Indonesia dan European Free Trade Association (EFTA) dalam perjanjian ini. Dunia usaha di Indonesia perlu mendapat

informasi yang baik tentang konsesi Indonesia di IE-CEPA serta persyaratan pasar EFTA untuk memaksimalkan manfaat dari perjanjian ekonomi ini. APINDO juga menunggu kesimpulan IE-CEPA untuk mempercepat proses modernisasi perdagangan Indonesia agar lebih transparan dan efisien untuk bisnis di masa depan.

APINDO mengapresiasi semakin kondusifnya situasi penetapan Upah Minimum (UM) 2019 yang berlangsung di akhir 2018 dalam suasana yang aman dan tertib, relatif lebih baik bila dibandingkan dengan kondisi penetapan UM serupa di 2015 dan 2016. Penetapan kenaikan UM 2019 sebesar 8,03% berdasarkan ketentuan PP 78/2015 berlangsung dalam situasi kondusif sesuai dengan tujuan penciptaan regulasi itu sendiri yaitu untuk menciptakan kepastian dan stabilitas iklim usaha dan investasi. Meskipun demikian APINDO menyayangkan masih ada daerah yang melanggar PP 78/2015 dengan menaikkan UM jauh di atas ketentuan yang oleh karenanya telah APINDO mintakan ketegasan pemerintah pusat untuk menertibkan daerah tersebut. Di tahun 2019 ini APINDO juga akan terus mengawal implementasi ketentuan PP 78/2015 dimana 5 tahun setelah masa berlakunya diperlukan penyesuaian KHL (Komponen Hidup Layak) yang dapat berimplikasi ke penetapan UM tahun mendatang. Sejak pertengahan 2018 sampai awal tahun 2019 APINDO secara intensif menyiapkan revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. APINDO akan memastikan bahwa kesepakatan Pleno LKS Tripartit Nasional untuk merevisi UU 13/2003 benar benar dapat dilaksanakan di tahun 2019 dengan substansi pengaturan ketenagakerjaan sesuai dengan tantangan jaman yang jauh berbeda dibandingkan awal UU tersebut dibentuk tahun 2003. Definisi kerja perlu rumusan baru dan karenanya akan berimplikasi ke pola relasi hubungan industrial dalam UU Ketenagakerjaan yang baru mendatang. UU Ketenagakerjaan yang baru juga harus disinkronkan dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional agar tidak terjadi duplikasi pungutan, memberikan ketentuan dasar pengembangan skills pekerja beserta sumber pembiayaan, keterkaitan antara produktivitas dan upah, dan sebagainya.

Perkembangan teknologi robotik dan digital yang saat ini berkembang semakin masif diharapkan memberi dampak positif terhadap industri yang mensyaratkan transformasi dari skema old industry ke arah new industry agar industri bertahan dan terus berkembang di era yang populer disebut Industri 4.0. Perubahan ini telah dan akan terus mengubah jenis jenis pekerjaan pekerjaan yang membutuhkan high skills untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Terkait hal ini, kita harus mampu mengatasi persoalan mismatch pekerjaan, skills underqualification, kekurangan pekerja dengan keterampilan tinggi (shortage of skilled labor), yang mutlak perlu didukung oleh ekosistem pengembangan ketrampilan pekerja yang komprehensif.

Memasuki era Industri 4.0 telah dicanangkan Pemerintah, APINDO beserta seluruh sektor industri prioritas akan terus berupaya fokus dalam 2 (dua) hal utama yaitu penyesuaian penggunaan teknologi dan pengembangan ketrampilan pekerja untuk meningkatkan produktivitas bangsa.

Penelitian yang dilakukan APINDO di industri padat karya seperti otomotif, makanan dan minuman, serta sektor alas kaki memperkuat beberapa hal yang berkembang dalam perekonomian bahwa untuk menghadapi tantangan industri 4.0 diperlukan efisiensi produksi melalui penggunaan high technology yang dijalankan oleh SDM dengan ketrampilan tinggi. Secara umum, program peningkatan kompetensi (pemagangan & link and match vokasi) maupun operasional sekolah kejuruan serta BLK yang saat ini berjalan belum mampu menyediakan SDM pekerja yang berketerampilan sesuai dengan standar industri. Dalam menyediakan SDM pekerja dengan kompetensi dan keterampilan siap kerja, dunia usaha menyiapkannya secara swadaya dengan biaya mandiri.

Banyak pelaku usaha bersikap 'skeptis' terhadap program pengembangan keterampilan Pemerintah sehingga lebih memilih untuk melakukan pelatihan mandiri. Namun di sisi lain terdapat juga pengusaha yang memiliki harapan besar terhadap Pemerintah dalam pengembangan program keterampilan pekerja. APINDO meminta agar konsistensi penyusunan kebijakan pengembangan keterampilan terhadap rencana pembangunan industri perlu diselaraskan. Kami berpendapat bahwa asosiasi usaha sektoral mitra APINDO berperan penting untuk menjadi jembatan antara Pemerintah dengan perusahaan, khususnya terkait sosialisasi dan implementasi program pengembangan keterampilan pemerintah terhadap perusahaan di sektor terkait. Untuk mendukung hal tersebut APINDO terus berupaya meyakinkan pemerintah agar menerapkan skema insentif bagi pengembangan skills SDM. Pemerintah dapat menerapkan insentif pelatihan bagi swasta, baik dalam bentuk tax deduction maupun insentif pelatihan langsung. Insentif inilah yang APINDO anggap dapat menjadi salah satu motivasi kuat bagi industri dan swasta untuk menyediakan pelatihan mandiri.

Terhadap regulasi kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah, APINDO berpandangan bahwa Pemerintah dapat saja menghasilkan berbagai kebijakan yang dipilihnya, namun pelaku usaha dan badan usahanya akan tetap selalu eksis dalam memberikan kontribusi bagi negara. Sehingga bila terjadi kebijakan yang tidak kondusif, maka dampaknya akan merugikan ekonomi dan rakyat kita sedangkan upaya untuk memperbaikinya kadang memerlukan waktu lama dan biaya besar. Oleh karena itu, dunia usaha mengapresiasi langkah Pemerintah dalam menerapkan sejumlah kebijakan. Namun disayangkan implementasi kebijakan tersebut belum maksimal. Sebenarnya regulasi yang dikeluarkan sudah baik, namun implementasinya di lapangan belum berjalan. Sebagai contoh adalah langkah pemerintah yang mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018. APINDO menganggap bahwa keputusan yang terdapat di dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI tersebut adalah sepihak, karena tidak melibatkan pelaku usaha dalam pembahasannya. Pemerintah semestinya mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada KADIN dan APINDO sebelum menjabarkannya kepada publik, sehingga tidak menimbulkan polemik di kalangan dunia usaha. Langkah pemerintah terkait DNI tersebut dianggap berdampak negatif bagi UMKM, karena dengan dikeluarkannya 54 bidang usaha dari DNI akan semakin membuka peluang kepada asing untuk membangun industri di Indonesia. Contoh lainnya adalah perizinan terpadu atau online single submission (OSS) yang belum siap

kelembagaan dan sistemnya namun dipaksakan pelaksanaannya sehingga program yang secara konseptual bagus ini tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

Melanjutkan upaya untuk perbaikan kualitas kebijakan usaha di tahun 2018, APINDO tetap memprioritaskan advokasi kebijakan sebagai prioritas utama 2019 sebagai representasi Dunia Usaha secara umum maupun khususnya bagi anggota APINDO. Advokasi kami lakukan melalui keterlibatan aktif Pengurus maupun anggota APINDO dalam penyusunan regulasi kebijakan maupun penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah. Advokasi kebijakan APINDO selama 2013-2018 mencakup bidang yang sangat luas seperti ketenagakerjaan, investasi, perdagangan, perpajakan, energi, persaingan usaha dan sebagainya. Advokasi kebijakan yang APINDO lakukan berbasis pada hasil kajian kebijakan serta data-data obyektif.

Rekomendasi kebijakan yang telah APINDO berikan kepada Pemerintah mencakup berbagai tingkat peraturan perundang-undangan seperti UU, PP, Perpres, sampai dengan Permen. Rekomendasi tersebut disampaikan berupa surat yang ditujukan ke Presiden, DPR-RI, Menteri, Direktur Jenderal sesuai topik kebutuhannya. Dalam berbagai persoalan yang sangat krusial, rekomendasi kebijakan disertai dengan advokasi melalui berbagai saluran seperti media masa cetak dan elektronik, lobbying dengan pengambil keputusan, audiensi ke lembaga-lembaga kepresidenan non-kementerian, pengamat/akademisi dan sebagainya. Beberapa diantaranya terkait Rencana Revisi UU Persaingan Usaha agar KPPU tidak menjadi super body; implementasi UU Produk Halal agar tidak salah arah yang dapat merugikan perekonomian nasional; judicial review UU Pajak dan Retribusi Daerah di MK untuk menghapuskan jenis pungutan yang tidak semestinya, penggantian UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan lain sebagainya.

Di tahun 2019 ini APINDO akan terus mengawal rancangan-rancangan legislasi di 2019 agar dapat menghasilkan produk hukum yang mampu menopang iklim dunia usaha yang sehat. RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, revisi UU Persaingan Usaha yang Sehat, RUU Pengelolaan Sumber Daya Air, RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP Jaminan Produk Halal dan PP Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang akan terus dicermati perkembangannya agar tidak bertentangan dengan mandat dan rekomendasi dunia usaha sehingga tidak melampaui ketaatan regulasi – demi menjamin kelangsungan dan perkembangan bisnis.

Melengkapi catatan yang ada, dalam memasuki tahun politik 2019 APINDO mengkhawatirkan konsistensi reformasi struktural yang sedang berlangsung karena fokus Pemerintah di 2019 ini terbagi akibat dinamika yang terjadi selama proses Pilpres dan Pileg. Selain itu, kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan oleh jajaran pembantu Presiden seperti pembuatan regulasi yang tidak relevan dan saling lempar tanggung jawab harus segera diakhiri. Hal ini penting untuk memberi sinyal politik yang kuat bahwa kepemimpinan nasional terus menonjolkan optimisme arah pembangunan Indonesia yang lebih baik sehingga kondusifitas iklim usaha yang dibangun Pemerintah tidak terganggu dan tidak menimbulkan kecemasan dunia usaha di tahun politik ini APINDO juga menghimbau Pemerintah untuk memperbaiki kinerja komunikasi dan

sosialisasi kebijakannya kepada Dunia Usaha, khususnya terkait kebijakan-kebijakan yang berorientasi penguatan daya saing industri manufaktur domestik. Meskipun karakter kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah selama ini dinilai cukup baik namun efektivitasnya terbentur pada implementasi kebijakan, yang menjadikan Dunia Usaha dan Investor tetap mempertahankan sikap kehati-hatian-hatiannya, terutama memasuki tahun politik kepemimpinan nasional pada 2019. APINDO berharap agar komposisi Kabinet Pemerintahan 2019-2024 mendatang, berisikan para pembantu Presiden yang semakin terbuka terhadap advokasi kebijakan Dunia Usaha dan pro terhadap kebutuhan Dunia Usaha bagi daya saing Indonesia yang semakin maju dan produktif.

Melalui berbagai upaya tersebut, APINDO berharap dapat berkontribusi untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen di tahun 2019 yang berada di bawah target pertumbuhan pemerintah dalam RAPBN 2019. Dunia usaha mengapresiasi pencapaian 2018 yang relatif terjaga dengan pertumbuhan terus naik meski tidak sangat tinggi, diiringi level inflasi yang terkontrol dalam batas yang dapat diterima. Proyeksi tersebut dibuat atas landasan kehati-hatian dunia usaha, khususnya untuk mengantisipasi potensi kelanjutan gejala eksternal yang dapat berpengaruh signifikan terhadap ekspansi dunia usaha, seperti fluktuasi nilai tukar dan ancaman perang dagang.

Sebagai catatan akhir, memasuki tahun Pilpres dan Pileg 2019 ini dunia usaha berharap diberikan teladan kepemimpinan yang nyata bekerja untuk bangsa, yaitu kepemimpinan yang nyata dan jauh dari pencitraan tanpa sumbangan berarti bagi perekonomian. Karakter dasar pelaku usaha adalah untuk sejalan dengan pemerintah sebagai pemimpin perekonomian. Namun dukungan dunia usaha untuk kemajuan perekonomian juga kami lakukan melalui peran kontrol kebijakan dan implementasinya, agar kita mampu menghindarkan diri dari gejala kelesuan ekonomi secara global, sehingga kita mampu memperlihatkan bahwa dunia usaha Indonesia akan semakin solid dan berkembang untuk memimpin ekonomi bangsa ini ke dalam kelompok ekonomi terbesar dunia di waktu mendatang.

Bersama ini juga saya mengajak seluruh pihak terutama dunia usaha untuk dapat mendukung segala upaya untuk produktivitas bangsa dengan terlibat bukan hanya di persoalan hubungan industrial namun di semua aspek yang akan langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kinerja dunia usaha. Saya berharap rekan-rekan pengusaha di daerah membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun prioritas pengembangan daerah masing-masing, membuat master plan pengembangan perekonomian daerah disertai dukungan kelembagaan untuk implementasinya. Untuk itu marilah kita bersama-sama pemerintah dan stakeholder lainnya terus meningkatkan kapasitas kita bersama demi kemajuan kualitas ekonomi dan kehidupan yang kita inginkan. Saya juga secara pribadi dan organisasi mengucapkan terima kasih kepada ribuan perusahaan anggota APINDO di seluruh Indonesia, termasuk asosiasi-asosiasi sektoral beserta mitra-mitra APINDO di pusat dan daerah, yang terus setia berjalan beriring bersama kami hingga memasuki tahun 2019 sekaligus mempercayakan mandatnya kepada kami dalam

memperjuangkan kepentingan dunia usaha nasional, serta tentunya tidak terlepas dari dukungan finansial yang diberikan. APINDO akan selalu berkomitmen untuk menjadi partner strategis Pemerintah secara berkesinambungan, sehingga kami dapat memenuhi komitmen dan tanggung jawab kami dalam melayani perusahaan anggota APINDO maupun dunia usaha Indonesia secara keseluruhan.

Saya juga menyambut baik terhadap terselenggaranya MUNAS ke-10 APINDO pada April 2018 lalu yang dapat kita lalui bersama dengan sukses dan lancar. Dengan diterimanyabhasil Laporan Pertanggung-jawaban saya dalam periode kerja 2013-2018 oleh seluruh DPP APINDO Propinsi, maka saya berharap periode kepengurusan mendatang akan semakin berjalan lebih baik sehingga mampu memaksimalkan peran DPP APINDO di seluruh propinsi. Saya juga akan berupaya memenuhi harapan DPPDPP terkait perlunya link business match making pelaku usaha nasional / ALB DPN dengan pelaku usaha daerah ALB/ AB DPP dan DPK. Selain itu saya juga akan mengakomodir harapan lain mengenai perlunya pengembangan Peraturan Organisasi (PO) tentang Hakim Ad Hoc PHI unsur APINDO, penguatan hubungan tripartit nasional dengan tripartit daerah, perbaikan data-base anggota APINDO, penerbitan Buku Sejarah APINDO yang sudah dimandatkan, peningkatan penguatan program pemagangan, perhatian serius Dewan Pengawas BPJS unsur APINDO untuk memperhatikan APINDO, serta perlunya kegiatan kegiatan APINDO berskala regional, dan lain sebagainya.

Sebagai penutup, saya telah memasuki tahun ke-5 di dalam masa kepemimpinan saya di APINDO seiring dengan dimulainya lembaran tahun 2019. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang masih diberikan kepada saya untuk kembali memimpin kepengurusan APINDO 2018-2023 melalui hasil MUNAS APINDO ke-10 pada April 2018 lalu. Tahun 2019 memasuki tahun politik dengan tantangan akan semakin besar. Namun saya meyakini APINDO akan menghadapi perubahan yang sangat mendasar dan luar biasa Transformasi APINDO dari organisasi yang kurang dikenal menjadi organisasi yang disegani dan dikenal berbagai stakeholders. Oleh karena itu, saat ini merupakan momen yang tepat untuk memperkuat APINDO Daerah, dengan berbekal dua modal dasar yaitu kepercayaan Pemerintah terhadap APINDO serta komitmen ALB terhadap pengembangan APINDO Daerah. Kepengurusan kedepan akan membuka sekat-sekat yang menjadi penghalang antar DPN dan DPP, yang dapat dicapai melalui duduk bersama sekaligus melihat potensi dan memberikan wawasan kepada daerah. Saya selalu optimis bahwa peran penting APINDO akan semakin mengemuka di 2019 maupun tahun-tahun berikutnya melalui sumbang pikiran dan rekomendasi kepada Pemerintah, agar cita-cita besar dunia usaha untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan bangsa ini dapat terealisasi melalui komitmen dan upaya kita bersama.

Terima kasih.

Hariyadi B. Sukamdani
Ketua Umum DPN APINDO



Substansi Fokus Outlook APINDO 2019

“Reformasi & Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Memperkuat Kinerja Pertumbuhan 2019 serta Pemerataan Ekonomi”

APINDO melihat bahwa pengembangan keterampilan merupakan isu utama ketenagakerjaan yang sangat penting untuk mendukung kinerja sektor industri Indonesia ke depan. APINDO mengapresiasi usaha pemerintah yang telah menetapkan kenaikan anggaran pengembangan SDM di RAPBN 2019 menjadi Rp 14 triliun. APINDO secara khusus meminta pemerintah untuk memperhatikan efektivitas dari anggaran ini agar dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor-sektor prioritas. Dalam riset APINDO terkait pengembangan keterampilan yang dilakukan di beberapa sektor prioritas, ditemukan bahwa dukungan finansial berupa anggaran pengembangan keterampilan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor-sektor prioritas. Pada riset yang sama, APINDO juga menemukan bahwa dalam lima tahun ke depan, volume produksi di sektor alas kaki dan makanan & minuman diproyeksikan dapat meningkat sebesar dua hingga tiga kali lipat tanpa harus menambahkan jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar karena otomasi menyesuaikan tantangan industri 4.0. Sehingga, efektivitas anggaran pengembangan keterampilan perlu ditekankan untuk mendorong produktivitas tenaga kerja di sektor prioritas.

APINDO juga mendorong kebutuhan mendesak labor reform karena tanpa perubahan mendasar, persoalan ketenagakerjaan hanya jalan di tempat. Fokus utama reformasi ketenagakerjaan diantaranya mendefinisikan ulang makna hubungan kerja agar sesuai dengan perkembangan karakter jenis pekerjaan baru saat ini dan di masa datang dengan segala implikasinya, keterkaitan pengupahan dengan produktivitas, penyesuaian dengan sistem jaminan sosial nasional ketenagakerjaan & kesehatan, serta strategi skills development dan pembiayaannya.

APINDO memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 sebesar 5,20 persen yang berada di bawah target pertumbuhan pemerintah dalam RAPBN 2019. Dunia usaha mengapresiasi pencapaian 2018 yang relatif terjaga dengan pertumbuhan terus naik meski tidak sangat tinggi, diiringi level inflasi yang terkontrol dalam batas yang dapat diterima. Proyeksi tersebut dibuat atas landasan kehati-hatian dunia usaha, khususnya untuk mengantisipasi potensi kelanjutan gejolak eksternal yang dapat berpengaruh signifikan terhadap ekspansi dunia usaha, seperti fluktuasi nilai tukar dan ancaman perang dagang.

Pertumbuhan tersebut diharapkan berorientasi keadilan sosial (growth with equality) selaras dengan pencapaian tujuan SDGs / pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dicapai melalui program jaring pengaman sosial, dana bantuan pendidikan dan kesehatan penyebaran infrastruktur yang merata, pengendalian harga barang pokok dan sebagainya. Dengan demikian implementasi PP 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat terlaksana.

APINDO mendesak pemerintah agar segera memperbaiki akuntabilitas data statistik yang sering berdampak pada implementasi kebijakan yang tidak tepat. Hal ini menjadi sangat penting mengingat polemik akurasi data masih menjadi sorotan selama bertahun-tahun atas berbagai hal. Di bidang pertanian misalnya, perkiraan luas lahan baku sawah yang keliru mengakibatkan proyeksi produksi terlalu tinggi, sehingga berdampak pada pelonjakan harga, defisit ketersediaan jumlah pangan serta memicu dilakukannya impor. Oleh karena itu dibutuhkan keberanian politik pimpinan negara yang mampu memperbaiki isu akurasi data ini.

APINDO meminta ketegasan pemerintah dalam membenahi ketidakselarasan antara berbagai Peraturan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Pusat yang berpotensi menjadi bom waktu pemicu konflik yang merugikan dunia usaha. Sebagai contoh, terdapat beberapa regulasi daerah yang mengatur upah minimum yang mengabaikan PP No. 78/2015 terkait pengupahan diantaranya seperti yang terjadi di Jawa Timur. Selain itu, ketidaksinkronan aturan perizinan pemerintah daerah dan pusat juga masih sering terjadi misalnya pada implementasi program Online Single Submission (OSS). Apabila persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, sudah pasti akan menyulitkan Indonesia untuk dapat menarik investasi baru dari dalam maupun luar negeri, sehingga hasil positif dari berbagai kerjasama ekonomi internasional juga tidak akan terwujud. Untuk mendukung berbagai upaya tersebut mutlak dibutuhkan kesamaan sikap dan kapasitas yang memadai antara lembaga eksekutif dan legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menghindari risiko-risiko destruktif yang dapat ditimbulkan. APINDO terus mengingatkan agar pemerintah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pelaku usaha terkait kebijakan-kebijakan strategis sebelum mengumumkannya, dan menjamin koherensi dalam penyusunan kebijakan serta implementasinya.

Ditengah keterbatasan upaya pemerintah, APINDO mengajak para pelaku usaha untuk melakukan penetrasi dagang (ekspor) di negara-negara partner non-tradisional. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam memperluas potensi perdagangan serta mengurangi ketergantungan impor dengan negara-negara partner tradisional. Hingga saat ini, beberapa anggota APINDO sudah mulai melakukan penetrasi pasar di negara-negara potensial baru di luar target pasar tradisional yang dilakukan selama ini.

Terkait besarnya potensi Pariwisata di Indonesia, APINDO melihat bahwa tidak ada daerah di Indonesia yang tidak memiliki potensi pariwisata, sehingga pengembangan kreativitas daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan pariwisata. Pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki dengan melibatkan unit terkecil pemerintahan desa, diantaranya dengan mengoptimalkan dana pusat dan daerah untuk pengembangan UMKM. Hal ini dapat dilakukan diantaranya melalui pengembangan kapasitas masyarakat dalam penggunaan IT untuk memasarkan potensi pariwisata dan produk produk kreatif daerah secara global. APINDO berharap langkah-langkah kecil seperti ini pada akhirnya dapat memberi dampak besar terhadap ekonomi Indonesia (small steps, high impacts). Alokasi anggaran pemerintah juga perlu ditingkatkan untuk promosi penjualan produk pariwisata baik melalui media konvensional maupun elektronik dengan mengurangi anggaran pencitraan/branding.

APINDO juga menekankan pentingnya Kewirausahaan Nasional guna Penciptaan Lapangan Kerja Baru. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan Kemitraan UMKM yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha besar dan UMKM itu sendiri. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mampu mendukung penciptaan lapangan kerja baru mengingat UMKM berkontribusi terhadap lebih dari 90% employment Indonesia sehingga dapat menjadi salah satu cara dalam memanfaatkan bonus demografi.

APINDO mengingatkan komitmen pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan guna mengembangkan industri dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan yang konsisten bagi seluruh industri dari hulu hingga hilir. Selain itu, keberpihakan pemerintah juga diperlukan dalam rangka mendukung pemanfaatan TKDN secara konsisten agar penggunaan produk yang sudah sesuai dengan TKDN dapat dimaksimalkan.

Terakhir, APINDO meminta pemerintah untuk tidak meninggalkan pengembangan sektor energi yang kompetitif agar mampu mendukung daya saing sektor usaha lainnya. Persoalan ini secara serius perlu ditangani mengingat banyaknya sumur minyak yang telah dan akan ditutup, namun belum ada investasi baru yang masuk pada sektor ini. Maka dari itu, APINDO mendesak pemerintah untuk memberikan kemudahan perizinan usaha dan investasi serta konsistensi implementasi RUEN agar dapat menarik investasi-investasi baru.***

PENDAHULUAN

Rentang waktu 12 bulan selama tahun 2018 yang dilalui negeri ini telah membuahkan banyak kisah dan cerita baik positif maupun negatif. Peristiwa-peristiwa besar yang menjadi sejarah dan dengan sejumlah bunga rampai problematika yang menghias telah pula memberikan warna baru dalam pertumbuhan Riau sebagai negeri Melayu. Tahun 2018 yang berlalu telah menorehkan catatannya sendiri bagi Riau dan khususnya bagi APINDO Riau yang senantiasa hadir mengiringi dan memberikan warna dalam detak langkah bumi Lancang Kuning ini.

APINDO yang erat kaitan dengan pertumbuhan ekonomi terutama dalam hubungan industrial dan investasi, merasa sangat berkepentingan dalam memberikan pandangan dalam kaca mata dunia usaha atas perkembangan daerah. Oleh karena itu maka dalam laman ini kami ingin mengambil ruang untuk sekedar mereview Riau dalam angka selama tahun 2018. Harapan kami catatan kecil ini bisa menjadi satu frame berfikir kita semua untuk membangun Riau lebih baik ke depan.

Pertama, iklim investasi. Mereview catatan Statistik Investasi Riau 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, maka kita bisa cukup berbangga dengan catatan prestasi sebagai berikut:

1. **Peringkat 9 (sembilan)** se Indonesia dalam realisasi investasi PMDN & PMA dengan nilai investasi mencapai **Rp 25,018.53 T**.
2. **Peringkat 9 (sembilan)** se Indonesia dalam realisasi investasi PMDN dengan nilai investasi **Rp 10,829.80 T**.
3. **Peringkat 11 (sebelas)** se Indonesia dalam realisasi investasi PMA dengan nilai investasi **US\$ 1,061.10 Juta**.
4. **Peringkat 2 (dua)** se Sumatera dalam realisasi investasi PMDN & PMA dengan nilai investasi **Rp 25,018.53 T**.
5. **Peringkat 2 (dua)** se Sumatera dalam realisasi investasi PMDN dengan nilai investasi **Rp 10,829.80 T**.
6. **Peringkat 3 (dua)** se Sumatera dalam realisasi investasi PMA dengan nilai investasi **US\$ 1,061.10 Juta**.

Kami dari DPP APINDO Riau merasa berbangga dengan capaian-capaian positif ini ditengah besarnya tantangan dalam merebut investasi. Tentu ini tidak mudah, namun ini menjadi suatu penyemangat bagi segenap elemen birokrasi dan legislatif beserta seluruh komponen masyarakat Riau untuk lebih mampu meraih yang lebih baik untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Memahami catatan ini tentunya kita dapat melihat bahwa Riau masih menjadi idola bagi PMDN maupun PMA. Nilai investasi yang masuk pada tahun-tahun mendatang sesungguhnya kami yakini bisa lebih besar dari angka-angka tersebut mengingat pada era 2017 – 2018 yang lalu RTRW Riau masih belum tuntas. Sebagaimana ulasan salah satu media lokal, pada awal 2016 Plt Sekretaris Daerah Provinsi Riau M. Yafiz mengatakan bahwa investasi terhambat oleh pembahasan RTRW yang belum selesai yang mencapai Rp. 70 triliun¹. Sementara pada tahun 2018 Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan bahwa pada masa belum tuntasnya RTRW terdapat sebanyak 200 aplikasi usaha yang terhambat perizinannya².

Buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Riau 2018 yang diterbitkan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Riau bahwa Perkembangan investasi di Provinsi Riau pada triwulan III 2018 tercatat tumbuh sebesar 3,60% (yoy), melambat dibandingkan triwulan II 2018 yang tumbuh sebesar 7,65% (yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perlambatan investasi non bangunan sebagaimana yang terkonfirmasi dari hasil liaison, defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menyebabkan tidak terlaksananya sejumlah kegiatan yang telah direncanakan sejumlah OPD, dan adanya tunda bayar proyek infrastruktur berjalan.

Melalui perjuangan panjang seluruh komponen pemerintah dan masyarakat Riau, pada akhirnya pertengahan tahun 2018 RTRW Riau tuntas di Perda-kan. Tuntasnya RTRW ini menjadi sebuah kebanggaan bersama bagi masyarakat Riau karena ini menjadi satu gerbang untuk tumbuhnya ekonomi Riau dengan hadirnya investasi baru. Tercatat sejumlah sektor saat ini masih terbuka luas untuk masuknya investor di 12 Kab./Kota di Riau. Sejumlah peluang investasi yang terbuka antara lain yaitu pengembangan industri hilir pengolahan kelapa sawit, industri biodiesel, pembangkit energi listrik, industri berbasis petrokimia, pupuk perkebunan, budidaya perikanan laut, pengolahan hasil perikanan, pertambangan (batu bara, bentonit, kaolin, pasir kuarsa, emas, perak, properti, pengembangan pariwisata daerah, industri semen, sarang walet, perkapalan, jasa angkut pelabuhan, industri arang dan sabut kelapa, karet, dan kakao.

Kedua, iklim politik. Tanggal 27 Juni 2018 merupakan sebuah momentum politik besar di Riau yang terjadi dengan digelarnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2018 – 2023. Melalui pilkada yang jujur, KPU Riau dalam sidang pleno selanjutnya menetapkan H. Syamsuar, M.Si sebagai Gubernur Riau

¹ <http://globalriau.com/>

² <http://gagasanriau.com/>

terpilih berpasangan dengan BRIGJEN TNI H. Edy Afrizal Natar Nasution, SIP sebagai Wakil Gubernur terpilih.

Tuntasnya pilkada dan terpilihnya pasangan baru yang akan memimpin Riau 5 tahun ke depan menjadi sebuah harapan baru bagi masyarakat Riau dalam perbaikan dan pengembangan diberbagai sektor. Melalui dua orang yang telah teruji kapasitas dan kualitas kepemimpinannya ini tertitip harapan besar bagi masyarakat dan para pelaku usaha daerah untuk bangkitnya ekonomi Riau yang juga saat ini masih berhadapan dengan iklim ekonomi global. Kondisi sektor migas yang masih belum membaik seutuhnya, harga CPO di pasaran dunia yang terus terpuruk dan berimbas bagi pelaku usaha perkebunan sawit di Riau yang mencapai 2 juta Ha, serta beberapa proyek infrastruktur yang masih belum tuntas adalah beberapa pekerjaan rumah bagi kedua pemimpin baru ini.

Ketiga, iklim Ekonomi. Merujuk pada Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Bank Indonesia Provinsi Riau pada November 2018 bahwa Perekonomian Riau triwulan III 2018 tumbuh sebesar 2,98% (yoy), tumbuh meningkat jika dibandingkan triwulan II 2018 yang sebesar 2,38% (yoy). Apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi tanpa migas Riau triwulan III 2018 tercatat sebesar 4,77% (yoy), meningkat dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang sebesar 3,97% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Riau sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang juga meningkat dari 4,66% (yoy) triwulan II 2018 menjadi 4,72% (yoy) pada triwulan laporan. Namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang pada triwulan II 2018 tercatat 5,27% (yoy) melambat menjadi 5,17% (yoy).

Disektor industri pengolahan sampai dipenghujung tahun 2018 harga jual CPO dipasar dunia masih belum mengalami perbaikan signifikan. Salah satu indikasi pelemahan harga CPO ini adalah berkembangnya kekhawatiran pelaku pasar akibat Parlemen Eropa yang setuju untuk melakukan pemungutan suara terkait revisi dokumen *Renewable Energy Directive* (RED). Revisi dokumen tersebut membuka peluang negara-negara anggota Uni Eropa (EU) melarang penggunaan CPO sebagai bahan baku produksi biodiesel. Kebijakan tersebut akan segera diimplementasikan dalam rancangan regulasi Post-2020 EU RED II, dan akan secara masif mengurangi ekspor CPO ke negara-negara EU sampai tahun 2030. Sementara upaya pemerintah dengan kebijakan mandatori B20 dalam upaya mempertahankan harga CPO, dinilai belum optimal untuk menggenjot konsumsi domestik. Hal ini juga menjadi sentimen negatif dari dalam negeri yang menyebabkan harga CPO di pasar internasional terpuruk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor CPO menyumbang 10,87% dari ekspor non-migas RI pada periode Januari-Agustus 2018. Data tersebut juga menyebutkan bahwa nilai

ekspor CPO jatuh 12,21% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada periode Januari-Agustus 2018 atau nilai nominal penurunannya mencapai Rp 22,87 triliun.

Keadaan tersebut diatas tentunya berdampak bagi perusahaan-perusahaan industri CPO termasuk yang berada di Riau. Informasi yang kami dapat dari para pelaku usaha industri CPO Riau bahwa jika keadaan ini tidak kunjung membaik dan menemukan jalan keluar, maka bukan tidak mungkin akan berimbas pada rasionalisasi tenaga kerja. Hal ini tentunya menjadi satu potensi masalah ekonomi dan sekaligus sosial di daerah jika tidak ada solusi.

Pada tahun 2018 lalu, sektor industri migas sebagai salah satu sektor andalan nasional dan Riau juga masih fluktuatif, bahkan pada periode bulan November 2018 harga minyak dunia anjlok lebih dari 20 persen dan ini merupakan pelemahan yang terparah selama lebih dari satu dekade karena dipicu oleh membanjirnya pasokan melampaui permintaan. Tekanan harga minyak ini juga besar dipengaruhi penguatan nilai US\$, dimana penguatan dolar AS akan membuat harga komoditas yang diperdagangkan dengan dolar AS menjadi relatif lebih mahal bagi konsumen yang memegang mata uang negara lain.

Bank Indonesia memprediksi secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan akan berada pada kisaran 2,60 - 3,10 % (yoy), dengan tendensi meningkat (namun terbatas) jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Riau untuk keseluruhan tahun 2019 diperkirakan bersumber dari meningkatnya konsumsi LNPRT, belanja pemerintah, dan net ekspor. Dari sisi sektoral, sektor industri pengolahan diperkirakan menjadi pendorong utama meningkatnya ekonomi Riau untuk keseluruhan 2019. Namun, peningkatan yang lebih tinggi tertahan oleh sektor pertambangan yang berkontraksi lebih dalam, serta sektor pertanian, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan yang diperkirakan mengalami perlambatan.

Kondisi iklim dunia usaha strategis nasional sampai saat ini memang masih belum membaik seutuhnya, namun harapan untuk tumbuhnya ekonomi Provinsi Riau dengan masuknya investasi baru akan terbuka luas seiring tuntasnya persoalan Rencana Tata Ruang & Wilayah (RTRW) Propinsi Riau. Selesainya pesta demokrasi pemilihan Gubernur Riau pada tahun ini menjadi semangat baru tahun 2019 dengan segenap keyakinan Riau akan lebih baik dan iklim investasi akan semakin menguat.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Sebagaimana tahun sebelumnya, pada tahun 2018 Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Riau tetap berjalan sesuai harapan dan semakin kuat memantapkan eksistensi sebagai salah satu organisasi komponen pembangunan daerah. Sejumlah aktivitas produktif baik intra organisasi maupun dengan pihak Pemerintah Daerah (Forkompinda) Riau sepanjang tahun 2018 telah mencatatkan APINDO Riau telah menjadi mitra strategis dan komponen stakeholder pemerintah dalam pembangunan.

Sebagai mitra pemerintah, DPP APINDO Riau sangat menyadari peran dan fungsi dasar organisasi dalam menjaga para pelaku usaha yang telah berinvestasi dan berkontribusi bagi daerah. Oleh karena itu keberadaan sebagai mitra pemerintah juga kami terjemahkan sebagai upaya perimbangan sikap dalam menetralsir kebijakan-kebijakan yang bisa berdampak negatif bagi para pelaku usaha. Pernyataan sikap ini tertuang dalam berbagai agenda kegiatan baik melalui forum meeting, melalui statemen di media, dan kajian-kajian yang bisa memberikan sumbang fikir bagi pemerintah dalam melahirkan regulasi yang ideal dan dapat diakomodir dunia usaha daerah.

Sebagai organisasi pengusaha APINDO Riau tidak hanya menyikapi berbagai hal terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersentuhan dengan dunia usaha, tetapi pada sisi strategis juga mengajak dan merangkul pelaku usaha untuk ikut serta mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang kami nilai produktif dan positif bagi perusahaan.

Sejumlah kegiatan yang mengajak pelaku usaha ikut serta dalam beberapa program positif pemerintah antara lain:

1. Sistem Pelaporan Limbah B3 secara elektronik (e-manifest) dengan melaksanakan sosialisasi yang langsung dipandu oleh narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.
2. Mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk mengambil peran strategis mengelola Blok Rokan.
3. Mendukung PP 78 tahun 2015 sebagai acuan untuk penetapan upah minimum.

Sementara hal-hal yang berupa pernyataan sikap dan respon DPP APINDO Riau terkait kebijakan-kebijakan lain dan perkembangan ekonomi aktual selama tahun 2018 dapat dilihat pada catatan yang tertuang melalui release media (terlampir).

Berikut kami sampaikan rekapitulasi kegiatan-kegiatan DPP APINDO Riau pada tahun 2018 lalu yang dalam laporan ini kami bagi menjadi 7 kelompok kegiatan kerja, yaitu:

	AKTIFITAS	JUMLAH
A	Aktifitas Internal	
	1. Konsolidasi DPK	5 Kali
	2. Pertemuan dengan members/stakeholders	7 Kali
	3. Menghadiri Acara DPK	2 kali
	4. Fasilitator Perundingan	7 Kali
	5. Penerbitan Dokumen	3 Kali
B	Aktifitas Kerjasama Antar Institusi	
	1. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah	3 Kali
	2. Kerjasama dengan NGO	1 kali
C	Aktifitas Partisipan Kegiatan	
	1. Tingkat Lokal (Provinsi)	52 Kali
	2. Tingkat Nasional	5 Kali
	3. Tingkat Regional	1 Kali
D	Aktifitas Sebagai Narasumber	2 Kali
E	Aktifitas Anggota Tim Kerja	8 Kegiatan

Berikut laporan selengkapnya seluruh kegiatan yang terbagi kedalam 5 (lima) kelompok sebagaimana tersebut di atas.

1. AKTIFITAS INTERNAL

A. Konsolidasi dengan DPK

Agenda konsolidasi kepengurusan dengan DPK adalah dalam rangka fungsi koordinasi dan konsolidasi dalam berbagai hal yang bersifat insidental terkait masalah-masalah aktual yang berkembang dan dihadapi. Kegiatan internal yang dapat kami laporkan, yaitu :

1. Pertemuan dengan DPK Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Januari 2018 dalam rangka membahas peraturan Walikota Pekanbaru No. 7 tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat di Kota Pekanbaru yang dihadiri oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno.
2. Pertemuan dengan DPK Se Riau di Jakarta pada tanggal 22 April 2018 dalam rangka dengar pendapat dan penyamaan suara untuk mendukung Bp. Hariyadi B. Sukamdani sebagai Ketua Umum DPN APINDO periode 2018 – 2023 melalui Munas X APINDO.

3. Rapat Konsolidasi anggota Dewan Pengupahan se Provinsi Riau dengan mengundang Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota unsur APINDO dan pengurus DPK Kab./Kota se Riau dan Konsolidasi Provinsi pada tanggal 7 September 2018 di Hotel Furaya Pekanbaru.
4. Pertemuan dengan caretaker APINDO DPK Rokan Hilir pada tanggal 30 Oktober 2018 dalam rangka memberikan arahan dalam persiapan kerja caretaker untuk pembentukan kepengurusan definitif APINDO DPK Rokan Hilir.
5. Pertemuan dengan pengurus APINDO DPK Indragiri Hulu pada tanggal 27 September 2018 di Sekretariat DPP APINDO Riau dalam pembahasan pergantian antar waktu kepengurusan DPK Indragiri Hulu.

b. Pertemuan dengan Members/ Stakeholders

Aktivitas pertemuan dengan members/ stakeholders APINDO menjadi satu agenda penting dalam hal meningkatkan komunikasi dan penyelesaian masalah-masalah aktual dunia usaha di Riau. Pertemuan ini menjadi penguat hubungan kemitraan antara DPP APINDO dengan members. Disamping pertemuan-pertemuan informal, DPP APINDO Riau juga menggelar pertemuan secara formal dengan para members yang sudah dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu :

1. Pertemuan APINDO dengan Perusahaan Jasa Penunjang Migas Riau untuk membahas tentang Perundingan UMSP Migas Riau tahun 2018 pada tanggal 17 Januari 2018 di Hotel Grand Zuri Duri Kab. Bengkalis. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno didampingi Sekretaris DPP Edi Darmawi dan Pengurus DPP Agus Setiawan.
2. Acara Buka Puasa Bersama Stakeholders dan mitra DPP APINDO Riau pada tanggal 19 Juli 2018 di Hotel Premiere Pekanbaru dihadiri oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Evarefita, SE., Msi., Disnakertrans Provinsi Riau, dan forkompinda Riau. Dalam acara ini juga diserahkan bantuan kepada 30 orang anak panti asuhan.

3. Pertemuan dengan manajemen PT. Energi Mega Persada dalam hal pembahasan pengupahan sektor migas pada tanggal 30 Juli 2018 di Sekretariat DPP APINDO Riau.
4. Rapat pembahasan Upah Minimum Sektor Migas 2018 pada tanggal 19 Juli 2018 di SKK Migas bersama KSBSI dan K3S yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPP APINDO Riau.
5. Pertemuan dengan Consulate General of The Republic of Singapura Mr. Mark Low di Hotel Premiere Pekanbaru pada tanggal 26 Oktober 2018 yang dihadiri oleh Ketua DPP Wijatmoko Rah Trisno dan Sekretaris DPP Edi Darmawi
6. Pertemuan dengan Hakim Ad Hoc PHI pada tanggal 12 November 2018 yang dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi.
7. Pertemuan pembahasan UMSP migas 2018 pada tanggal 18 Desember 2018 dengan perusahaan-perusahaan migas Riau di Kantor DPP APINDO yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPP.

h. Menyikapi Regulasi

Pada tahun 2018 lalu, berdasarkan laporan dari members DPP APINDO Riau terdapat perihal yang dinilai memberatkan dunia usaha yaitu pungutan Pajak Penerangan Jalan atas Sumber Tenaga Listrik Pembangkit Daya Sendiri oleh perusahaan. Hal ini selanjutnya diteruskan DPP APINDO Riau untuk dilakukan proses peninjauan kembali (*judicial review*) atas Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) & (2), SERTA Pasal 55 ayat (2) & (3) terkait Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dalam UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Gugatan ini diajukan oleh DPP APINDO Riau melalui pengacara yang ditunjuk oleh DPN APINDO.

Adapun secara ringkas hasil gugatan ini dimenangkan oleh dunia usaha yang diwakili APINDO. Hasil gugatan sebagaimana tertuang dalam surat DPN APINDO No. 508/DPN/3.2.1/5C/XII/12 tertanggal 18 Desember 2018 perihal Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pajak Penerangan Jalan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) & (2), SERTA Pasal 55 ayat (2) & (3) terkait Pajak

Penerangan Jalan (PPJ) dalam UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertentangan dengan UUD 1945.

Selanjutnya melalui surat tersebut DPN APINDO menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara konstitusional tuntutan APINDO terpenuhi, pasal-pasal mengenai Pajak Penerangan Jalan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Dengan demikian pasal-pasal tersebut di atas sudah tidak memiliki keabsahan secara konstitusional, dan sudah semestinya tidak dapat menjadi acuan dalam penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan aturan pelaksanaannya, khususnya mengenai Pajak Penerangan Jalan.
3. Dalam Amar Putusan tersebut dicantumkan bahwa Mahkamah memerintahkan pembuat Undang-undang untuk segera membuat Undang-undang baru dimana listrik yang dihasilkan dari pembangkit daya sendiri tidak masuk dalam pengertian Pajak Penerangan Jalan.

Surat yang ditembuskan ke Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sekretaris Negara tersebut, APINDO atas Amar Putusan tersebut untuk menjamin kepastian hukum mengharapkan kepada Menteri Keuangan RI membuat Surat Edaran ke seluruh Bupati/ Walikota di Indonesia untuk tidak melakukan pungutan Pajak Penerangan Jalan atas Sumber Tenaga Listrik Pembangkit Daya Sendiri, sampai adanya Undang-Undang baru yang mengatur hal tersebut.

i. Menghadiri Acara DPK

Menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan DPK menjadi hal yang sangat penting bagi DPP APINDO Riau sebagai apresiasi dan dukungan atas kegiatan-kegiatan produktif. Kegiatan DPK yang dihadiri DPP APINDO Riau pada tahun 2017 terdiri dari:

1. Acara Seminar dan pelatihan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Pesisir Timur Sumatera (Dumai) dalam Peningkatan SDM dan Perekonomian Masyarakat pada tanggal 22 Februari 2018 di Dumai yang dihadiri oleh Bendahara DPP APINDO Riau R. Elwan Jumanri dan Sekretaris Eksekutif DPP Arfi Marzuki.
2. Acara Musyawarah Kabupaten DPK Apindo Bengkalis pada tanggal 5 Agustus 2018 di Duri yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPP Peri Akri, Ketua DPP Wijatmoko Rah Trisno, Sekretaris DPP Edi Darmawi,

Bendahara DPP R. Elwan Jumanri, Sekretaris Eksekutif DPP Arfi Marzuki, dan Staff Sekretariat DPP Dian Oktaviani.

c. Fasilitator Perundingan

Dalam fungsi tugas hubungan industrial, DPP APINDO Riau merupakan perwakilan pelaku usaha dalam berbagai hal dan salah satunya dalam proses perundingan pengupahan. Sektor migas merupakan salah satu bidang yang menjadi dimensi kerja APINDO Riau khususnya dalam penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Riau pada setiap tahunnya. Hal ini karena APINDO Riau telah ditunjuk oleh pelaku usaha migas Riau untuk mewakili mereka dalam perundingan penetapan UMSP Migas. Selama periode tahun 2018, DPP APINDO Riau telah memfasilitasi dan melaksanakan perundingan UMSP Migas dengan 6 Serikat Buruh/ Serikat Pekerja (SB/SP) di Riau sebanyak 7 kali perundingan, yaitu:

1. *Perundingan ke-1* pada tanggal 9 Februari 2018 di Hotel Premiere, penetapan Tata Tertib Perundingan UMSP Migas 2018.
2. *Perundingan ke-2* pada tanggal 28 Maret 2018 di Kantor DPP APINDO Riau, dengar pendapat usulan besaran kenaikan UMSP Migas dari SB/SP dan APINDO Riau dimana SB/SP mengusulkan besaran kenaikan sebesar 18% dan APINDO Riau mengusulkan 4%.
3. *Perundingan ke-3* pada tanggal 6 April 2018 di Kantor DPP APINDO Riau, perundingan lanjutan pembahasan untuk mencari kesepakatan besaran kenaikan UMSP Migas 2018 dimana disesi akhir perundingan masih belum ditemukan kesepakatan yaitu SB/SP berada pada posisi kenaikan 15% dan APINDO 6% dan dengan tidak ditemukan kesepakatan besaran kenaikan, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan ke Disnakertrans Riau.
4. *Perundingan ke-4* pada tanggal 12 April 2018 di Kantor Disnakertrans Provinsi Riau, perundingan Tripartit dengan Disnakertrans Provinsi Riau dengan putusan bahwa besaran kenaikan UMSP Migas 2018 dikembalikan berdasarkan kesepakatan hasil perundingan antara APINDO dan SB/SP.
5. *Perundingan ke-5* pada tanggal 4 Mei 2018 di Kantor DPP APINDO Riau, perundingan ulang antara APINDO dan SB'/SP sebagai tindak lanjut putusan dari pertemuan di dari Disnakertrans Riau dengan hasil dimana para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan belum ditemukan kesepakatan.
6. *Perundingan ke-6* pada tanggal 19 Mei 2018 di Kantor DPP APINDO Riau dengan hasil yang sama atau belum tercapai kesepakatan antara para pihak untuk besaran kenaikan UMSP Migas 2018.

7. *Perundingan* ke-7 pada tanggal 30 Agustus 2018 di Kantor DPP APINDO Riau, menjadi perundingan final dengan kesepakatan bersama para pihak yaitu nilai kenaikan UMSP Migas 2018 adalah sebesar 13% atau Rp. 3.039.717.

d. Penerbitan Dokumen

Selama tahun 2018 lalu DPP APINDO Riau telah menerbitkan beberapa dokumen Surat Keputusan (SK) yaitu:

1. Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Defenitif DPK Kab. Bengkalis No. 073/KEP-DPP/APINDO/IX/2018 masa bakti 2018 – 2023.
2. Surat Keputusan (SK) Caretaker untuk DPK Rokan Hilir No. 076/KEP-DPP/APINDO/X/2018.
3. Surat Keputusan (SK) Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan DPK Indragiri Hulu No. 075/KEP-DPP/X/2018.

2. AKTIFITAS PROGRAM KEMITRAAN

Kegiatan kemitraan sinergi DPP APINDO dengan pihak lain yang sudah dilaksanakan yaitu :

1. Kemitraan dalam panitia bersama Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam pelaksanaan Liga Pekerja Indonesia (Lipesia) Zona Provinsi Riau pada tanggal 10 Februari – 3 Maret 2018 di Pekanbaru.
2. Kemitraan dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam agenda FGD Revisi UU No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dari Persepsi dan Ekspektasi Pelaku Usaha pada tanggal 1 Maret 2018 di Hotel Premiere Pekanbaru yang diikuti oleh 27 peserta utusan dari perusahaan-perusahaan di Riau.
3. Kemitraan dengan Asia Competitiveness Institute (ACI) Lee Kwan Yeow Scholl Singapura dalam hal Survey Tingkat Daya Saing Usaha 2018 Provinsi Riau pada tanggal 31 Mei 2018 bertempat di Hotel Premiere Pekanbaru yang diikuti oleh 42 peserta.
4. Kemitraan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dalam Sosialisasi dan Praktek Sistem e-Manifest Limbah B3 (Pelaporan secara elektronik) pada tanggal 26 Januari 2018 di Hotel Premiere Pekanbaru yang diikuti oleh 32 peserta.

3. AKTIFITAS PARTISIPAN KEGIATAN

Selama periode tahun 2018 APINDO aktif menghadiri berbagai kegiatan baik tingkat lokal, nasional, maupun regional. Semaksimal mungkin seluruh undangan yang diterima diupayakan untuk dapat dihadiri, namun demikian beberapa agenda undangan tidak dapat dihadiri mengingat waktu dan kesempatan dari pengurus untuk memenuhi undangan dimaksud. Berikut kegiatan-kegiatan yang dihadiri DPP APINDO Riau sebagai peserta/ partisipan :

a. Kegiatan Tingkat Lokal Daerah

JANUARI

1. Upacara Bulan K3 Nasional Provinsi Riau tahun 2018 pada tanggal 17 Januari 2018 di Kantor Gubernur Riau yang dihadiri oleh Bendahara DPP APINDO Riau R. Elwan Jumanri.
2. Evaluasi dan persiapan Kick Off Liga Pekerja Indonesia zona Provinsi Riau tahun 2018 pada tanggal 18 Januari 2018 bertempat di Kantor Disnakertrans Riau yang dihadiri oleh Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi.
3. Seminar Manfaat Layanan Tambahan dan Manfaat Lainnya yang dapat Meningkatkan Kesejahteraan Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Penandatanganan MoU KADIN Riau dengan BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 30 Januari 2018 bertempat di Gedung Daerah Provinsi Riau yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arfi Marzuki.



FEBRUARI

4. Raker Indonesia Marketing Association (IMA) pada tanggal 3 Februari 2018 di Pekanbaru yang diwakili oleh Wakil Ketua DPP Bukhari.



5. Pembukaan Kick Off Liga Pekerja Indonesia Zona Riau oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman di Stadion Rumbai Pekanbaru pada tanggal 10 Februari 2018 yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau.



6. Seminar dan Pelatihan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Pesisir Timur Sumatera (Dumai) dalam Peningkatan SDM dan Perekonomian Masyarakat pada tanggal 22 Februari 2018 di Dumai yang dihadiri oleh Bendahara DPP R. Elwan Jumanri dan Sekretaris Eksekutif DPP Arfi Marzuki.



7. Wisuda Angkatan ke-II STAI Lukman Edy TA. 2017/ 2018 pada tanggal 27 Februari 2018 di Hotel Pangeran Pekanbaru yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arfi Marzuki.
8. Penutupan Liga Pekerja Indonesia (Lipesia) Zona Riau tahun 2018 pada tanggal 28 Februari 2018 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arfi Marzuki.

MARET

9. Ramah Tamah dengan Plt. Danrem 031 Wirabima pada tanggal 2 Maret 2018 di Gedung Daerah Provinsi Riau yang dihadiri oleh Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi.



10. Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Industri Manufaktur dan Industri Pendukung yang dilaksanakan oleh *University Network For Indonesia Export Development* (UNIED) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor

Indonesia (LPEI) pada tanggal 23 Maret 2018 di Gedung Rektorat Universitas Riau.

APRIL

11. Pelantikan dan Pengukuhan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Provinsi Riau pada tanggal 6 April 2018 bertempat di Aula BP Paud dan Dikmas Riau yang dihadiri oleh oleh Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi.

12. Bimbingan Teknis Kader Produktivitas pada tanggal 18 – 20 April 2018 di Hotel Pangeran – Pekanbaru yang diikuti oleh Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi.



13. Supervisi Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas) terhadap Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Riau pada tanggal 24 – 26 April 2018 di Hotel Labersa – Kampar yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengupahan Provinsi unsur APINDO Elfeni Erdianta.

MEI

14. Pembukaan Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri pada tanggal 9 Mei 2018 di Hotel Grand Zuri yang dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi darmawi.



15. Sahur bersama Menteri Tenaga Kerja RI Bp. Hanif Dhakiri di Hotel Premiere Pekanbaru pada tanggal 19 Mei 2018 yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dan sejumlah pengurus DPP APINDO Riau.



JUNI

16. Buka Puasa Bersama KADIN Riau pada tanggal 8 Juni 2018 di Hotel Grand Central Pekanbaru yang dihadiri oleh Sekretaris DPP dan Sekretaris Eksekutif DPP.



17. Komunikasi Sosial Danrem dan Komponen Masyarakat pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Aula Korem 031 Wirabima yang dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi



JULI

18. Peresmian Kantor Cabang Vpower Operation Service Provinsi Riau pada tanggal 5 Juli 2018 yang dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi.



19. Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Provinsi Riau 2018 pada tanggal 10 Juli 2018 bertempat di Aula BI Riau yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arfi Marzuki.



20. Pertemuan LKS Tripartit Riau "Sosialisasi UMSP Pertanian/perkebunan dan Pabrik Tahun 2018" pada tanggal 11 Juli 2018 bertempat di Disnakertrans Provinsi Riau yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPP Bukhari dan Huiniati.

21. Launching Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Provinsi Riau oleh Bappeda Provinsi Riau pada tanggal 12 Juli 2018 bertempat di Hotel Grand Central Pekanbaru yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arfi Marzuki.



22. SAC Meeting April Group pada tanggal 16 Juli 2018 di Hotel Premiere Pekanbaru yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arfi Marzuki.



23. Pertemuan dengan perwakilan KSBSI dalam aksi demo terkait UMSP Migas tahun 2018 pada tanggal 19 Juli 2018 bertempat di kantor SKK Migas Riau yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPP APINDO Riau.



24. Pendampingan dan Tindak Lanjut Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Riau dari KPK RI melalui Kadin Riau pada tanggal 20 Juli 2018 di Gedung Daerah Provinsi Riau yang dihadiri oleh Koordinator Bidang Hub. Industrial dan Advokasi DPP APINDO Elfenni Erdianta dan Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arfi Marzuki.



25. Launching Rumah Singgah Pasien RSUD bekerjasama LAZISMU dengan IDI Riau pada tanggal 23 Juli 2018 yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arfi Marzuki.

26. Halal Bi Halal BPD Abujapi Riau pada tanggal 25 Juli 2018 di Hotel Furaya Pekanbaru yang dihadiri oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno.



27. Coffee Morning Kadin Riau tentang Komite Advokasi Daerah pada tanggal 27 Juli 2018 di aula KADIN Riau yang dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi dan Sekretaris Eksekutif DPP Arfi Marzuki.



28. Rapat pembentukan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Riau di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau pada tanggal 31 Juli 2018 yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arfi Marzuki.



AGUSTUS

29. Riau Berzikir pada tanggal 8 Agustus 2018 bertempat di Masjid An Nur Pekanbaru yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arfi Marzuki.



30. Peringatan Hari Jadi Provinsi Riau pada tanggal 9 Agustus 2018 yang bertempat di Kantor Gubernur Riau dihadiri oleh Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno.

31. Sosialisasi dan Edukasi Savings Bond Ritel seri 004 pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di Aula BI Riau yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPP Peri Akri dan Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arfi Marzuki.



32. Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 2018 yang dihadiri oleh Ketua DPP Wijatmoko Rah Trisno.



SEPTEMBER

33. Sosialisasi Peningkatan Kesehatan dan Perlindungan Pekerja tahun 2018 pada tanggal 12 September 2018 di Hotel Furaya Pekanbaru yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arfi Marzuki.



34. Seminar tentang Bedah Minor, Memahami JKN dan Cara Penghematan Dana Perusahaan pada tanggal 12 September 2018 di Klinik Amanda Jl. Kartini Pekanbaru yang dihadiri oleh Staff Sekretariat DPP Dian Oktaviani.

35. Seminar Economic Update and Challenges pada tanggal 12 September 2018 di Kantor BI Riau yang dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi.



36. Survey Persaingan Usaha Provinsi Riau oleh KPPU Pusat pada tanggal 29 September 2018 di Kofi Tofi Cafe Jl. Kartini Pekanbaru dengan narasumber Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno.

OKTOBER

37. Rapat Pembentukan Tim Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Riau tahun 2019 – 2024 di Kantor Bappeda Riau tanggal 3 Oktober 2018 dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Arfi Marzuki.



38. Rapat Dewan Juri Anugerah Penghargaan Siddhakarya 2018 Disnakertrans Provinsi Riau pada tanggal 15 Oktober 2018 di Kantor Disnakertrans Riau yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Arfi Marzuki.



39. Seminar Implementasi dan Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan tentang Penyakit Akibat Kerja yang diselenggarakan oleh KSBSI dan BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 25 Oktober 2018 di Hotel Royal Asnof Pekanbaru yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Arfi Marzuki.



40. Rapat Tim Juri Anugerah Penghargaan Siddhakarya 2018 Disnakertrans Provinsi Riau dengan Tim Verifikasi Pusat pada tanggal 26 Oktober 2018 di Kantor Disnakertrans Provinsi Riau yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Arfi Marzuki.



41. Kajian Kebijakan Keberlanjutan Industri Rayon APRIL Group pada tanggal 30 Oktober 2018 di Hotel Premiere Pekanbaru yang dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi.



42. Forum Informasi Pasar Luar Negeri (Hamburg, Budapest, dan Santiago) Kemendag RI di Hotel Novotel tanggal 31 Oktober 2018 yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Arfi Marzuki.



NOVEMBER

43. Melepas Pengiriman Bantuan untuk korban bencana tsunami di Palu dan Donggala yang digelar oleh LAZISMU Riau pada tanggal 7 November 2018 di Universitas Muhammadiyah Riau yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Arfi Marzuki.

44. Talkshow di Green Radio Pekanbaru pada tanggal 8 November 2018 tentang pengupahan yang dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi.

45. Rapat Komite Advokasi Daerah Provinsi Riau di KADIN Riau pada tanggal 8 November 2018 yang dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi.



46. Penutupan Riau Expo tahun 2018 di Komplek Rumah Gubernur Riau pada tanggal 9 November 2018 yang dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi.



47. SDGs Academy Roadshow pada tanggal 12 November 2018 di Hotel Premiere Pekanbaru yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Arfi Marzuki.



48. Penyerahan Penghargaan Siddhakarya 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau pada tanggal 29 November 2018 di Hotel Furaya Pekanbaru yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Arfi Marzuki.



DESEMBER

49. Rapat Anugerah Penghargaan Paritrana BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Riau tahun 2018 diruang Sekda Provinsi Riau pada tanggal 4 Desember yang dihadiri oleh Bendahara DPP APINDO Riau R. Elwan Jumanri.



50. Musyawarah Cabang VIII Gapensi Kota Pekanbaru tahun 2018 di Hotel Pengeran Pekanbaru pada tanggal 5 Desember 2018 yang dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi.



51. Uji Publik II KLHS RPJMD 2019 - 2024 Provinsi Riau di Bappeda Provinsi Riau pada tanggal 5 Desember 2018 yang dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif DPP Arfi Marzuki.



52. Sosialisasi Pendaftaran Peserta PPB BU Swasta melalui OSS di Hotel Pangeran Pekanbaru pada tanggal 11 Desember 2018 yang dihadiri oleh Wakil Sekretaris DPP Agus Setiawan dan Zulfikar.



b. Kegiatan Tingkat Nasional

1. Musyawarah Nasional (Munas) X APINDO tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 23 – 25 April 2018 yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara, Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau beserta sejumlah pengurus DPK se-Riau.



2. Forum Diskusi tentang Unemployment Insurance kerjasama DPN dan ILO di Jakarta pada tanggal 5 September 2018 yang dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi.



3. Bimtek Kemudahan dan Peluang Usaha Bidang Telekomunikasi pada tanggal 6 September 2018 di Hotel Grand Aston Medan yang dihadiri oleh Sekretaris DPP Edi Darmawi.

4. Konferensi Hubungan Industrial (*Industrial Relation Conference*) tahun 2018 di Jakarta pada tanggal 8-9 November 2018 yang dihadiri oleh Ketua DPP Wijatmoko Rah Trisno dan Bendahara DPP R. Elwan Jumanri.



5. Rembug Tripartit Regional III pada tanggal 21 – 23 November 2018 di Yogyakarta yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPP Huiniati dan Sekretaris DPP Edi Darmawi.



c. Kegiatan Tingkat Regional

1. Menghadiri undangan Asia Competitiveness Institute (ACI) di Singapura pada tanggal 25 - 28 November 2018 di Singapura dengan utusan Wakil sekretaris DPP APINDO Riau, Agus Setiawan.



6. SEBAGAI NARASUMBER

Pengurus DPP APINDO Riau selama masa tahun 2018 juga menerima beberapa undangan permintaan sebagai narasumber kegiatan, yaitu :

1. R. Elwan Jumanri (Bendahara DPP APINDO Riau) sebagai narasumber Seminar dan Pelatihan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Pesisir Timur Sumatera (Dumai) dalam Peningkatan SDM dan Perekonomian Masyarakat pada tanggal 22 Februari 2018 di Dumai.
2. Edi Darmawi (Sekretaris DPP APINDO Riau) sebagai narasumber dalam Talkshow di Green Radio Pekanbaru pada tanggal 8 November 2018 tentang pengupahan.

7. SEBAGAI ANGGOTA TIM

A. Dewan Pengupahan

DPP APINDO Riau juga merupakan bagian dari Dewan Pengupahan Provinsi Riau. Perihal Dewan Pengupahan ini adalah sebagaimana tertera pada Bab Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengupahan.

B. LKS Tripartit

Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah hubungan industrial sebelum meningkat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Surat

Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: Kpts.16/I/2017 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Provinsi Riau Masa Bakti 2017 – 2019 dengan Ketua Gubernur Riau dan anggota yang terdiri dari Disnakertrans Provinsi Riau, Setda Provinsi Riau, Bappeda Provinsi Riau, KADIN Riau, APINDO Riau, DPW SARBUMUSI Riau, SBSI Riau, DPP SBSI Riau, F.SBSI Riau, dan DPD K.SPSI Riau. Dari DPP APINDO Riau telah ditetapkan 4 orang sebagai anggota LKS Tripartit yaitu:

1. Ketua DPP APINDO Riau Wijatmoko Rah Trisno
2. Wakil Ketua Bidang Advokasi DPP APINDO Riau, Huiniati
3. Wakil Ketua Bidang Organisasi DPP APINDO Riau, Bukhari
4. Sekretaris DPP APINDO Riau, Edi Darmawi

C. Pengurus BKSP Riau

Guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan sumber daya manusia kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja industri dalam dan luar negeri di Provinsi Riau, maka telah dibentuk Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP). Gubernur Riau melalui Surat Keputusan Nomor: Kpts. 1147/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016 yang salah satunya menunjuk Ketua DPP APINDO Riau sebagai Anggota Pengurus BKSP Riau.

D. Panitia Bersama Liga Pekerja Indonesia (Lipesia) Zona Riau 2018

APINDO Riau dipercaya sebagai salah satu komponen dalam kepanitiaan pelaksanaan Liga Pekerja Indonesia (Lipesia) Zona Riau tahun 2018 dimana Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau Arfi Marzuki ditunjuk sebagai Bendahara Panitia Lipesia Zona Riau tahun 2018.

E. Tim Juri Anugerah Penghargaan Siddhakarya 2018 Disnakertrans Provinsi Riau

Anugerah Penghargaan Siddhakarya merupakan penghargaan bagi pelaku usaha kecil, menengah, dan besar yang dinilai berhasil dalam kinerja pengembangan usaha. Pada tahun 2018 Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau menjadi salah satu tim juri dalam penentuan perusahaan yang berhak memperoleh Penghargaan Siddhakarya tahun 2018 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

F. Tim Juri Anugerah Penghargaan Paritrana 2018 BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Riau

Penghargaan Paritrana yaitu anugerah penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan dan melaksanakan dengan baik segala bentuk kewajiban serta melaksanakan hak-hak ketenagakerjaan atas BPJS Ketenagakerjaan. Salah

satu tim juri penilai penghargaan Paritrana ini yaitu Bendahara DPP APINDO Riau R. Elwan Jumanri.

G. Tim Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Riau tahun 2019 – 2024

Tim Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Riau tahun 2019 – 2024 ditetapkan melalui SK Gubernur Riau Nomor: Kpts. 923/X/2018 dimana Sekretaris Eksekutif DPP APINDO Riau menjadi tim dalam bidang kelompok kerja ekonomi dan sumberdaya alam.

H. Pengurus Forum Komunikasi Jejaring Permagangan (FKJP) Provinsi Riau

Forum Komunikasi Jejaring Permagangan (FKJP) Riau ditetapkan melalui SK Kadisnakertrans Prov. Riau No. Kpts/ Disnakertrans-PPTK/2017, dimana Sekretaris DPP APINDO Riau Edi Darmawi ditunjuk sebagai Kordinator FKJP Riau periode 2016 – 2019.

KEANGGOTAAN

Kami dari DPP memandang bahwa keanggotaan merupakan hal yang sangat penting, karena tidak ada organisasi yang mampu eksis tanpa dukungan anggota. Oleh karena itu DPP APINDO Riau berupaya untuk memperkuat barisan keanggotaan agar ke APINDO semakin kuat pula membumi di Riau ini.

Keanggotaan perusahaan sebagai anggota APINDO di tingkat DPP pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Tercatat jumlah anggota pada tahun 2018 adalah sebanyak 50 perusahaan, yang terdiri dari:

A. Platinum Members

Platinum Members APINDO Riau yaitu perusahaan-perusahaan swasta nasional yang memberikan investasi tetap bulanan ke DPP APINDO Riau sebesar Rp. 2.000.000 atau lebih. Terdapat 7 perusahaan yang termasuk dalam platinum members ini yaitu :

No.	PERUSAHAAN	BIDANG USAHA	HOME BASE
1	PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI)	Migas	Duri
2	PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP)	Pulp & Paper	Pkl. Kerinci
3	PT. Indah Kiat Pulp And Paper (IKPP)	Pulp & Paper	Perawang
4	PT. Arara Abadi	Kehutanan	Perawang
5	PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN)	Kelapa Sawit	Pekanbaru
6	PT. Bumi Siak Pusako (BSP)	Migas	Pekanbaru
7	PT. Schlumberger	Migas	Minas

B. Anggota Biasa

Anggota biasa yaitu perusahaan yang tergabung sebagai members DPP APINDO Riau yang berkontribusi memberikan iuran rutin bulanan dibawah nominal iuran Platinum Members. Terdapat 90 perusahaan yang tergabung pada kelompok ini. Data perusahaan Anggota Biasa terlampir.

TUGAS POKOK SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN

1. DASAR HUKUM DEWAN PENGUPAHAN

Untuk menetapkan nilai upah buruh maka pemerintah telah membentuk Dewan Pengupahan Propinsi Riau yang terdiri dari 29 orang anggota. Dewan Pengupahan ini terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor Kpts. 41/II/2017 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Riau Masa Bakti 2017 – 2019. Dewan pengupahan ini diketuai oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan keanggotaan terdiri dari :

- Disnakertrans Provinsi Riau
- Biro Hukum Setda Provinsi Riau
- Bappeda Provinsi Riau
- Disperindag Provinsi Riau
- BPS Provinsi Riau
- BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Riau
- KADIN Provinsi Riau
- APINDO Provinsi Riau
- SPTP – BUN PTPN V
- DPW Sarbumusi Provinsi Riau
- Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia Provinsi Riau
- DPP SBCI Provinsi Riau
- PD Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (PD FSP KEP-SPSI) Provinsi Riau
- PD Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (PD FSPPP-SPSI) Provinsi Riau
- PW-SBSI Korwil Provinsi Riau

Adapun APINDO Riau dalam Dewan Pengupahan ini diwakili oleh 4 orang dari Dewan Pengurus Provinsi:

N A M A	JABATAN
R. Elwan Jumanri, SH., MH	Bendahara
Elfenni Erdianta Br. Bangun, SH, MH	Koord. Bidang Hubungan Industrial, Advokasi, & Pengupahan
Delveri, SE. Ak	Wakil Sekretaris
Agus Setiawan, SE	Wakil Sekretaris

2. CAPAIAN KINERJA DEWAN PENGUPAHAN RIAU

Tugas dan tanggung jawab dewan pengupahan Dewan Pengupahan sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor Kpts. 41/II/2017 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Riau Masa Bakti 2017 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Upah Minimum Provinsi Riau (UMP)
2. Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK)
3. Menerapkan Sistem Pengupahan di tingkat Provinsi

Selanjutnya dalam proses penetapan upah minimum pemerintah telah membuat suatu dokumen yang disebut dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pegupahan. PP ini memberikan rumusan-rumusan untuk memutuskan besaran nilai upah minimum baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Pada tahun 2018 lalu, Dewan Pengupahan Provinsi telah melaksanakan tugasnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan berpedoman pada PP No. 78 tahun 2015 dan Menteri Tenaga Kerja RI No. B.240/M-NAKER/PHISSK-UPAH/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018, dan telah menghasilkan suatu kesepakatan yang selanjutnya ditetapkan melalui SK Gubernur Riau Nomor: Kpts. 911/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Riau tahun 2019 yang menerangkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 di Provinsi Riau adalah sebesar Rp. 2.662.025,63 (*dua juta enam ratus enam puluh dua ribu dua puluh lima enam puluh tiga sen rupiah*), atau besar kenaikan dari tahun 2017 adalah sebesar 8,03%.

3. PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTOR MIGAS

Sesuai amanat PP.78/ 2015 pasal 49 **“Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/ atau kabupaten/ kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”**.

Oleh karena itu pada tahun 2018 dan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya DPP APINDO Riau juga telah menjadi perwakilan perusahaan migas dalam perundingan bersama 6 (enam) Serikat Buruh/ Serikat Pekerja. Disamping sebagai wakil perusahaan migas, DPP APINDO Riau juga menjadi fasilitator pelaksana perundingan penetapan upah minimum sektor migas. Adapun 6 (enam) serikat buruh sektor migas tersebut yaitu:

- DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Provinsi Riau
- Serikat Buruh Riau Independen (SBRI) Provinsi Riau
- Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (SBSI) Provinsi Riau

- Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Riau
- DPW Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Provinsi Riau
- DPP Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) Provinsi Riau

Hasil kesepakatan bersama perundingan antara APINDO dan SP/SB selanjutnya ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2018 melalui SK Gubernur Riau Nomor: 863/X/2018 tentang Upah Minimum Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam Provinsi Riau tahun 2018 bahwa upah sektor migas mengalami kenaikan sebesar 13% atau sebesar Rp. 3.039.717,- (*Tiga juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah*).

PERKEMBANGAN DEWAN PIMPINAN KABUPATEN/ KOTA

1. KONDISI DPK SE RIAU

Dewan Pengurus Kabupaten/ Kota (DPK) APINDO di Provinsi Riau secara umum perlu untuk kami laporkan. Sampai akhir tahun 2018 terdapat 7 DPK yang berstatus defenitif dan 5 DPK masih berstatus caretaker. Berikut data status kepengurusan DPK APINDO se Provinsi Riau :

	Kota/ Kabupaten	Status	Ketua
1.	Kota Pekanbaru	Defenitif	DR. Fahrial, SP, SE, ME, CRBD
2.	Kota Dumai	Defenitif	Ruslan
3.	Kabupaten Kampar	Defenitif	Muhammad Amin
4.	Kabupaten Siak	Defenitif	Kamaruzzaman
5.	Kabupaten Indragiri Hulu	Defenitif	Malik
6.	Kabupaten Indragiri Hilir	Defenitif	Said Yusuf
7.	Kabupaten Bengkalis	Defenitif	Marnalom Hutahaeen
8.	Kabupaten Pelalawan	Caretaker	R. Elwan Jumanri
9.	Kabupaten Rokan Hulu	Caretaker	Hamulian Nasution
10.	Kabupaten Rokan Hilir	Caretaker	Rasmali
11.	Kabupaten Kuantan Singingi	Caretaker	Aris Susanto
12.	Kabupaten Kep. Meranti	Caretaker	Bastian

2. KINERJA DPK DALAM PENETAPAN UMK

Keberadaan DPK APINDO di setiap Kabupaten/ Kota menjadi suatu hal yang penting untuk mewujudkan visi APINDO. Salah satu tugas Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota adalah mengawal pelaksanaan perhitungan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) yang dilaksanakan pada setiap tahun.

Aktivitas DPK dalam Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota pada tahun 2018 lalu telah berhasil mengawal besar kenaikan upah untuk tahun 2019 secara umum rata sebesar 8,03% pada 10 Kab./ Kota sesuai perhitungan PP 78 tahun 2015 dan surat Menteri Tenaga Kerja RI No. B.240/M-NAKER/PHISSK-UPAH/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 yang menyebutkan bahwa berdasarkan inflasi nasional (2,88%) dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (5,15%) maka kenaikan UMP adalah sebesar 8,03%. Nilai UMK ini telah di tetapkan melalui SK Gubernur Riau Nomor; Kpts. 949/XI/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau tahun 2019. Dalam SK ini tidak termasuk satu kabupaten yaitu Kab. Indragiri Hulu yang sampai akhir tahun 2018 masih belum ada kesepakatan antara DPK APINDO Indragiri Hulu yang meminta kenaikan sesuai

surat menteri yaitu sebesar 8,03% dan perwakilan SP/SB yang meminta pada kenaikan 12,03%.

Sementara Kabupaten Bengkalis yang pada tahun 2018 merupakan Kabupaten dengan UMK tertinggi se Provinsi Riau, kenaikan UMK untuk tahun 2019 dapat diminimalisir tingkat kenaikannya mencapai 2,95%. Berikut daftar kenaikan UMK se Provinsi Riau untuk tahun 2019 berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor: Kpts. 949/XI/2018 tertanggal 21 November 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Riau tahun 2019 yang dalam laporan ini kami susun berdasarkan Kab./Kota dengan UMK tertinggi hingga yang paling rendah:

	Kota/ Kabupaten	UMK	%Tase Kenaikan
1.	Kota Dumai	Rp. 3.118.453,87-	8,03 %
2.	Kabupaten Bengkalis	Rp. 3.005.582,37-	2,95 %
3.	Kabupaten Siak	Rp. 2.809.443,46-	8,03 %
4.	Kabupaten Kuantan Singingi	Rp. 2.806.608,49-	8,03 %
5.	Kabupaten Pelalawan	Rp. 2.766.919,08-	8,03 %
6.	Kota Pekanbaru	Rp. 2.762.852,91-	8,03 %
7.	Kabupaten Indragiri Hilir	Rp. 2.750.618,96-	8,03 %
8.	Kabupaten Kep. Meranti	Rp. 2.749.909,12-	8,03 %
9.	Kabupaten Rokan Hulu	Rp. 2.728.647,15-	8,03 %
10.	Kabupaten Kampar	Rp. 2.718.724,80-	8,03 %
11.	Kabupaten Rokan Hilir	Rp. 2.707.384,96-	8,03 %

3. KEANGGOTAAN PERUSAHAAN DI DPK

Berikut kondisi keanggotaan perusahaan di DPK APINDO pada setiap Kabupaten/ Kota per bulan Desember 2018:

	Dewan Pimpinan Kab./ Kota	Status	Jumlah Members
1.	Kota Pekanbaru	Defenitif	21
2.	Kota Dumai	Defenitif	50
3.	Kabupaten Kampar	Defenitif	29
4.	Kabupaten Siak	Defenitif	10
5.	Kabupaten Indragiri Hulu	Defenitif	42
6.	Kabupaten Indragiri Hilir	Defenitif	6
7.	Kabupaten Pelalawan	Caretaker	33
8.	Kabupaten Bengkalis	Caretaker	17
9.	Kabupaten Rokan Hulu	Caretaker	-
10.	Kabupaten Rokan Hilir	-	-
11.	Kabupaten Kuantan Singingi	Caretaker	4
12.	Kabupaten Kep. Meranti	Caretaker	2
	TOTAL		203

APINDO TRAINING CENTER

1. KEGIATAN

APINDO Training Center (ATC) merupakan wadah yang didirikan sebagai wadah peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi karyawan dari perusahaan-perusahaan members APINDO Riau. Sejak terlahir pada tanggal 24 Oktober 2013 ATC telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan diantaranya:

NO	JENIS PELATIHAN	TAHUN PELAKSANAAN
1	Strategi Implementasi Praktek Outsourcing sesuai dengan Permenakertrans No. 19/2012 dan Surat Edaran Menakertrans No. SE.04/MEN/VIII/2013	2013
2	Enterpreneurship Training	2013
3	Lokakarya “Menghindari Multitafsir Implementasi Permenakertrans No. 19/2012”	2013
4	Pelatihan Pembuatan “Perjanjian Kerja Waktu (Tertentu dan Tidak tertentu)”	2014
5	Basic Leadership Skill Training	2014
6	Workshop Teknik Perancangan Kontrak Bisnis	2014
7	Workshop Implementasi UU No. 24 / 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	2014
8	Industrial Relation Training	2014
9	Training Sertifikasi Ahli K3 Umum	2014
10	Workshop Ketenagakerjaan “Praktikal Hukum Ketenagakerjaan dari Perspektif Pengusaha”	2016
11	Workshop Ketenagakerjaan “Strategi Penyusunan Perjanjian Kerja, PP, dan PKB Secara Efektif”	2016
12	Workshop Ketenagakerjaan “Menyusun Struktur dan Skala Upah”	2017

ATC Riau sebagai wadah implementasi misi APINDO dalam meningkatkan SDM perusahaan-perusahaan di Riau sekaligus sebagai unit business center DPP APINDO Riau, sudah mempersiapkan agenda-agenda training yang akan ditawarkan kepada pihak perusahaan member maupun non member. Keberadaan ATC sebagai wadah *capacity building* bagi SDM perusahaan menjadi sangat penting ke depan mengingat tantangan-tantangan dunia usaha untuk eksis dan tumbuh kembang dalam hubungannya dengan *industrial relation* semakin besar. Dunia usaha semakin membutuhkan personil yang handal dan diakui (tersertifikasi) untuk mampu bersaing merebut pasar lokal, nasional, dan global.

2. STRUKTUR MANAJEMEN ATC

APINDO Training Center (ATC) yang berdiri dalam status badan hukumnya sebagai Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Pusat Pengembangan APINDO Riau melalui Akta Notaris Neni Sanitra, SH No. 29 Tanggal 23 Januari 2016 yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0005935.AH.01.01. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pusat Pengembangan APINDO Riau.

Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2018 manajemen PT. Pusat Pengembangan APINDO Riau atau ATC melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bertujuan untuk merevitalisasi fungsi ATC dengan membangun struktur manajemen baru. RUPS tersebut dihadiri oleh Komisaris dan jajaran Direksi ATC.

Hal-hal yang menjadi keputusan dalam RUPS tersebut sebagai berikut:

1. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Direktur Utama ATC tahun buku 2017/ 2018.
2. Menerima pengunduran diri dan selanjutnya memberhentikan dengan hormat jajaran Direksi sebelumnya.
3. Melakukan perubahan nomenklatur jabatan dan mengangkat Direksi baru

Terkait keputusan-keputusan hal tersebut di atas, maka Rapat lebih lanjut memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui penambahan kegiatan usaha dalam Pasal 3 Anggaran Dasar ATC dengan penambahan kegiatan usaha bidang kerja Konsultan Lingkungan Hidup.
2. Mengurangi jumlah jabatan Direksi dari 3 (tiga) direktur menjadi 2 (direktur) dengan menghapus jabatan Direktur Administrasi dan Keuangan.
3. Merubah nomenklatur jabatan anggota Direksi dari Direktur Riset, Pelatihan, dan Sertifikasi menjadi Direktur Pengembangan Usaha/ *Business Development*.
4. Mengangkat dan menetapkan Direksi baru ATC sebagai berikut:
Direktur Utama : R. ELWAN JUMANRI
Direktur Pengembangan Usaha : BUKHARI
Direktur Operasional dan Marketing : ARFI MARZUKI
5. Meminta jajaran Direksi untuk segera menyusun Rencana Kerja Perusahaan (RKP) tahun 2019 dan Standar Operating Procedure (SOP) perusahaan.
6. Memberikan Kuasa dan Wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat,

termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/ atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/ atau perubahan dalam Anggaran Dasar tersebut jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya atas perubahan-perubahan mendasar ini, maka telah dilegalkan melalui Akta Notaris Neni Sanitra, SH No. 13 tanggal 22 Nopember 2018 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0026804.AH.01.02.TAHUN 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pusat Pengembangan APINDO.

POKOK-POKOK RENCANA KERJA 2019

Menjawab tantangan pada tahun 2019 dan permasalahan-permasalahan pada tahun 2018 lalu, maka DPP APINDO Riau telah menyusun langkah-langkah konseptual strategis sebagai upaya penguatan peran dan fungsi organisasi. Beberapa rencana program sebagai resolusi tahun 2019 masih belum banyak berbeda dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Keanggotaan Aktif DPP APINDO Riau

Members merupakan kekuatan utama bagi APINDO dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Oleh karena itu DPP menilai bahwa program ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan tahun 2019 sebagai kelanjutan program tahun 2018.

2. Mendefinitifkan 5 DPK APINDO

Mendefinitifkan DPK yang saat ini masih berstatus caretaker menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan agar eksistensi APINDO di Kabupaten/ Kota se Riau semakin kuat.

3. Pengembangan dan Peningkatan ATC

ATC sebagai wadah training akan kembali dikelola dengan baik agar bisa menjadi wadah peningkatan kapasitas karyawan anggota APINDO Riau.

4. Refresh Struktur Dewan Kepengurusan

Refresh atau penyegaran kepengurusan ini penting mengingat beberapa orang anggota kepengurusan DPP APINDO Riau sebagai perwakilan manajemen perusahaan telah mengalami mutasi tugas di luar Riau dan ada yang sudah meninggal dunia.

5. Penguatan hubungan kemitraan

Penguatan hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga strategis ini penting untuk membangun kerangka berfikir yang sama dalam membangun ekonomi daerah melalui pengembangan investasi dan iklim usaha yang kondusif.

PENUTUP

Perjalanan sepanjang tahun 2018 penuh dinamika. Berbagai tantangan harus dihadapi oleh para pelaku usaha untuk mempertahankan eksistensi dalam kancah pembangunan ekonomi Riau. Perjuangan melawan hambatan telah menyita energi yang demikian besar, namun semua itu tidak sia-sia. Buah demi buah perjuangan dipetik, harapan semakin membentang luas ke depan.

Kami pengurus DPP APINDO Riau sangat bersyukur dengan tuntasnya agenda-agenda besar daerah yang menjadi pintu kemajuan dunia usaha nantinya. Perjalanan ini akan terus kami ikuti, kawal, dan kritisi untuk tetap berada pada koridor keberpihakan kepada pelaku usaha. Amanah tugas ini selama tahun 2018 lalu kami laksanakan seoptimal mungkin dengan membangun komunikasi serta koordinasi dengan berbagai pihak baik members kami, Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) APINDO, maupun Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Kami berterima kasih kepada para members kami yang telah mensupport DPP APINDO Riau dengan dukungan financial sehingga kami dapat terus berkiprah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perwakilan dunia usaha Riau.

Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau kami juga menyampaikan terima kasih yang tetap melihat APINDO sebagai mitra kerja pembangunan daerah dan melibatkan kami dalam berbagai aktifitas kegiatan daerah. Melalui kemitraan harmonis ini kami berharap Riau akan tumbuh kembang menjadi provinsi terdepan dalam pembangunan SDM dan ekonomi, terutama dengan hadirnya pimpinan baru Bumi Lancang Kuning tercinta ini.



Ketua DPP APINDO Riau, Pengurus DPP dan DPK foto bersama Menaker RI Hanif Dhakiri di Kantor Sekretariat DPP APINDO Riau (19/5/2018)

SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) APINDO RIAU

 Hotel Furaya Lt. 1, Ruang Akasia – Jl. Jendral Sudirman No. 72 - 74 Pekanbaru 28151 – Riau

 0761-8656545

 apindo_riau@yahoo.com

 apindoriau.or.id